

BAB III

KETERLIBATAN ARAB SAUDI DALAM KONFLIK SURIAH

Pada bab sebelumnya telah disampaikan mengenai gambaran umum konflik Suriah yang berawal dari protes dari para orang tua dari anak-anak yang ditahan oleh pemerintah Suriah. Namun dalam perkembangannya konflik ini menyita perhatian dunia internasional dan menyebabkan beberapa pihak atau negara melakukan ikut campur dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, walaupun sebenarnya pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan tersendiri di dalamnya.

Pada bab ini akan dijelaskan lima hal tentang keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Suriah. Pertama, awal mula keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Suriah. Kedua, bentuk dukungan yang diberikan pemerintah Arab Saudi terhadap kelompok oposisi. Ketiga, upaya pemerintah Arab Saudi di dalam forum internasional Liga Arab dan PBB, keempat dinamika hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat, kelima hubungan kerjasama Arab Saudi dan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Suriah.

A. Awal Mula Keterlibatan Arab Saudi Dalam Konflik Suriah

Konflik Suriah dimulai sejak maret 2011, diawali dengan aksi damai di kota Dara ditunjukkan kepada pemerintah Suriah Bashar Al-Assad menuntut pembebasan 15 orang anak yang ditahan karena membuat coretan di dinding yang menyerukan bahwa masyarakat Suriah menginginkan rezim Bashar Al-Assad untuk turun setelah mereka melihat televisi yang menyiarkan revolusi Tunisia, Mesir dan Libya. Lalu dilanjutkan dengan protes-protes yang lebih besar, seperti menuntut kebebasan berekspresi dan berpolitik, dicabutnya *emergency law* yang telah telah diterapkan sejak 1963 pada saat kepemimpinan Hafez Al-Assad, dibebaskannya tahanan

politik yang dikriminalisasi pemerintah, serta berujung pada konflik bersenjata antara kubu pemerintah dan oposisi mengingnkan turunnya Bashar Al-Assad dari kursi kepresidenan dan menuntut lahirnya sistem demokrasi di tanah Suriah.

Demonstrasi yang pada awalnya berjalan damai ini ditanggapi pemerintah dengan agresif. Pemerintah menganggap aspirasi masyarakat sebagai ancaman. Lebih dari 200.000 korban jiwa tewas sejak konflik Suriah pada tahun 2011. Sekitar 66.000 ribu korban adalah penduduk sipil, 10 ribu anak-anak dan 7.000 perempuan (Asnita, 2016). Menurut UNICEF, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016, jumlah korban anak-anak meningkat tinggi. Setidaknya 652 jiwa melayang dalam kurun waktu 12 bulan, meningkat daripada tahun 2015. Selain itu, Krisis Suriah disebut sebagai krisis kemanusiaan terburuk sejak Perang Dunia ke-II (MSN, 2017). Hal ini menyebaikan Suriah menjadi salah satu kota yang mematikan di dunia.

Aksi kekerasan militer yang dilakukan pemerintah Bashar Al-Assad kepada para demonstran mendapatkan perhatian dunia internasional karena merupakan salah satu pelanggaran HAM berat. Sekertaris Jendreal PBB, Ban Ki Moon mengecam tindakan pemerintah Suriah yang membubarkan demonstrasi damai Suriah dengan peluru tajam dan tank. “Saya mengecam dilanjutkannya aksi kekerasan terhadap demonstran damai. Khususnya penggunaan tank dan peluru tajam yang membunuh dan melukai ratusan warga. Hal itu dilakukan pemerintah Suriah tanpa peduli bahwa mereka memiliki kewajiban melindungi rakyat sipil serta menghormati hak asasi manusia internasional. Itu juga mencakup hak kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai. Komisi tinggi untuk hak asasi dan saya sepakat, di sana harus dilakukan pengusutan yang independen, transparan dan efektif.” Kata Ban Ki Moon pada saat pertemuan di New York (Kostermans, 2011).

Salah satu negara yang pertama kali mengecam dan menanggapi dengan keras tindakan pemerintah Suriah adalah Arab Saudi. Dalam pidatonya, Raja Abdullah mengatakan, "Kerajaan Arab Saudi menuntut diakhirinya mesin kematian dan pertumpahan darah sekaligus mulai bertindak bijaksana sebelum terlambat," pesan ini disampaikan kepada pemerintah Suriah dalam siaran yang ditayangkan stasiun televisi Al-Arabiya. Pada 7 Agustus 2011, Arab Saudi resmi menarik Duta Besar nya dari Suriah setelah penyerangan yang dilakukan para pengunjung rasa terhadap kantor kedutaan Arab Saudi di Suriah (VIVA, 2011). Arab Saudi merasa pemerintah Suriah telah gagal memilih tindakan dalam upaya penyelesaian konflik internalnya sehingga menyebabkan meluasnya serangan-serangan yang terjadi di kota Suriah, termasuk membahayakan keamanan dan kepentingan negara lain di Suriah.

Keterlibatan Arab Saudi terhadap pemerintah Bashar Al-Assad secara nyata dibuktikan pada tanggal 12 November 2011 Arab Saudi mendukung pencabutan sementara keanggotaan Suriah di Liga Arab. Pemerintah Arab Saudi menegaskan, "Pemerintah Arab Saudi dengan keras mengecam insiden tersebut dan meminta pihak berwenang Suriah bertanggung jawab atas keamanan dan perlindungan semua kepentingan Arab Saudi di Suriah," (BBC, 2011). Pernyataan tersebut merupakan tanggapan pemerintah Arab Saudi setelah ratusan pengunjung rasa pendukung Bashar Al-Assad pada hari yang sama masuk ke kantor kedutaan Arab Saudi di Damaskus dan merusak beberapa barang milik kedutaan setelah menerobos masuk ke kedutaan Arab Saudi.

Munculnya keterlibatan Arab Saudi muncul sebagai aksi respon terhadap tindakan pemerintah Bashar Al-Assad yang mengabaikan kecaman dari negara-negara & komunitas internasional atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukannya terhadap para demonstran. Sehingga, Arab Saudi melakukan inisiatif untuk berupaya menyelesaikan konflik

tersebut dan selalu menjadi negara pertama yang menuntut hal tersebut.

B. Bentuk Dukungan Arab Saudi Terhadap Kelompok Oposisi Suriah

Arab Saudi memutuskan untuk mendukung gerakan oposisi pemerintah Suriah dengan menjadi negara penyedia senjata dan pendukung utama kelompok oposisi Suriah. (Wicaksana, 2015) Pada tahun 2013, dilaporkan Arab Saudi menjadi salah satu penyedia utama persenjataan kelompok oposisi Suriah.



Gambar 3.1 Peta Bantuan Persenjataan yang Diberikan Arab Saudi Tahun 2012

Sumber: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2012/10/18/whos-fighting-who-in-syria/?utm_term=.688ac6f614b2 diunduh pada 20 Oktober 2017

Dukungan berupa bantuan persenjataan dari Arab Saudi diterima secara resmi oleh kelompok oposisi pada Desember

2012. Gambar diatas menunjukkan persenjataan masuk melalui 2 perbatasan wilayah Suriah. Wilayah selatan Suriah yaitu Yordania. Bantuan-bantuan militer ini berupa senjata anti-tank M-79 dan senapan M-60 yang dibeli Arab Saudi dari Kroasia (Sengupta, 2015). Persenjataan juga masuk dari wilayah perbatasan Suriah dengan Turki. Tujuan pengiriman terpisah ini dikabarkan untuk memperkuat kelompok oposisi dari beberapa penjuru Suriah untuk mengepung Damaskus. Pasalnya, menurut salah satu sumber dari kelompok oposisi *Free Syrian Army*, tujuan perpindahan pasokan senjata dari utara ke selatan adalah untuk mengalihkan fokus perang dari utara ke selatan mendekati ibukota. "Hal ini akibat pergerakan kelompok oposisi di utara sejak tahun 2012 kurang menimbulkan ancaman bagi pemerintah di Damaskus." Kata Saleh al-Hamwi, salah satu coordinator *Free Syrian Army* di provinsi Hama. Menurutnya posisi Deraa dan Hama di selatan Suriah memiliki rute yang lebih dekat menuju ibukota Damaskus sebagai pusat utama revolusi (DeYoung, 2013).

Puncak keikutsertaan militer Arab Saudi dalam konflik Suriah ditunjukkan pada september 2015 ketika pemerintah Rusia melakukan penyerangan militer pertamanya di Suriah dengan mengirimkan serangan udara ke kota-kota di Suriah. Menanggapi aksi penyerangan tersebut, pada bulan Oktober 2015 dikabarkan Arab Saudi dan Qatar bekerja sama dengan Amerika Serikat secara sembunyi-sembunyi memberikan bantuan persenjataan lebih intensif kepada kelompok pemberontak *Free Syrian Army*, salah satunya rudal anti-tank BGM-71 (Perry, 2015). Penggunaan rudal ini dianggap berhasil menghambat intervensi yang dilakukan oleh Rusia karena adanya kota Morek yang kembali jatuh ke tangan kelompok pemberontak.

Pada Februari 2016 Arab Saudi mengumumkan telah menyiapkan pasukan sekitar 350.000 orang tentara berlatih di Hafar al Batin di Arab Saudi utara, tidak jauh dari perbatasan Irak dan Kuwait. Latihan militer ini dinamakan "*North Thunder Exercise*" diikuti oleh 20 negara dan disebutkan

sebagai latihan militer terbesar dalam sejarah Timur Tengah (Smith, 2016). Latihan ini ditujukan untuk melawan kelompok teroris ISIS di Timur Tengah, khususnya Suriah.

Selain bantuan keamanan, Arab Saudi juga memberikan dukungan berupa bantuan dana dan kemanusiaan. Pada tanggal 23 Juli 2012, dibawah seorang ulama terkemuka Syekh Al-Arifi sekaligus sebagai advokad dan perwakilan gerakan dukungan Arab Saudi terhadap kelompok oposisi Suriah, melakukan kampanye nasional penggalangan dana yang diperuntukan kepada perlawanan kelompok oposisi di Suriah. Dana ini terkumpul sebanyak 124,73 US\$ yang diberikan kepada kelompok oposisi *Free Syrian Army* dan *Syrian Nation Council* (Tjarsono, 2015). Dukungan ini diberikan dalam rangka membangun kekuatan kelompok oposisi dan menghindari korban jiwa lebih banyak lagi.

Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada para pengungsi dan korban rezim pemerintah Suriah juga ditunjukkan pada tanggal 12 Agustus 2012, ketika truk konvoi yang berasal dari Arab Saudi menuju ke kamp pengungsi Suriah di Yordania. Truk-truk ini membawa bantuan kemanusiaan senilai 125 juta US\$ atau sekitar Rp 1,2 triliun (Tempo, 2012). Bantuan ini diharapkan mengurangi kematian yang diakibatkan oleh penyakit dan kelaparan akibat terbatasnya sumber makanan di seluruh penjuru Suriah.

Pada tanggal 7 maret 2016, Abdulaziz Al-Rabeeh seorang penasihat kerajaan Arab Saudi menandatangani kesepakatan dengan Elhadj Amandou Sy, Sekjen Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) untuk membuka pintu warga Suriah untuk tinggal di Arab Saudi serta memberikan bantuan kemanusiaan lainnya kepada para pengungsi. Sebanyak 343.150 warga Suriah terdaftar mendapat pendidikan gratis di sekolah menengah maupun universitas yang ditanggung pemerintah Arab Saudi. Layanan kesehatan gratis juga disediakan untuk

para pengungsi Suriah di semua rumah sakit milik pemerintah di Inggris. Lebih dari 2 juta warga Suriah telah menikmati bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah Arab Saudi sejak awal krisis Suriah. Bantuan yang diberikan meningkat dari 100 US\$ menjadi 780 US\$. Bantuan ini dibawah pengawasan langsung putra mahkota Arab Saudi , Mohammed bin Nayef (SindoNews, 2016).

Arab Saudi menjadi pihak yang sangat penting bagi hadirnya kelompok oposisi. Bantuan Arab Saudi merupakan dukungan pihak asing pertama yang masuk ke dalam konflik Suriah. Hal ini tidak terlepas bahwa ada kepentingan selain sekedar ingin menegakan keadilan bagi masyarakat Suriah.

C. Upaya Global Pemerintah Arab Saudi Dalam Forum Internasional

Arab Saudi ikut berperan aktif dalam menyuarakan bahwa Syiah merupakan penyebab kekacauan kawasan Timur Tengah. Arab Saudi juga mengajak negara-negara lain di kawasan untuk menjatuhkan sanksi kepada pemerintah Suriah atas dasar pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Bashar Al-Assad terhadap warga sipil Suriah. Upaya global Pemerintah Arab Saudi dalam mengatasi konflik Suriah ditunjukkannya dengan kerjasama yang dilakukan dengan organisasi kawasan seperti Liga Arab maupun organisasi internasional PBB. Bahkan upaya Arab Saudi kerap kali didukung oleh pemerintah Amerika Serikat yang juga menginginkan pemerintah Bashar Al-Assad untuk turun dari kursi kepresidenan.

1. Liga Arab

Upaya global pemerintah Arab Saudi dalam upaya penyelesaian konflik Suriah ditunjukkan pada 12 November 2011 pada saat Liga Arab melakukan sidang darurat tingkat Menteri Luar Negeri Liga Arab di Kairo, Mesir. Terkait pergolakan yang terjadi di Suriah, Liga Arab secara resmi memutuskan untuk menanggukkan keanggotaan Suriah di organisasi

regional beranggotakan 22 negara Timur Tengah tersebut (Detik, 2011). Alasannya, pemerintah Suriah dianggap gagal menghentikan pertumpahan darah setelah sebelumnya pemerintah Bashar Al-Assad berjanji untuk menghentikan kekerasan terhadap para demonstran oposisi pemerintah (Adilien, 2012). Keputusan membekukan keanggotaan Suriah berlaku mulai 16 November 2011 hingga waktu yang belum bisa ditetapkan.

Pada tanggal 26 Desember 2011, Arab Saudi bersama Liga Arab mengirimkan sekitar 70 orang dalam misi pengamatan ke Suriah. Misi pengamatan ini dilakukan setelah Suriah menandatangani protokol pengamat Liga Arab pada 19 Desember 2011 di Kairo setelah Liga Arab mengancam menyerahkan masalah ini ke PBB. Misi ini ditujukan untuk memantau apakah pemerintah Suriah berkomitmen terhadap empat tuntutan Liga Arab untuk menghentikan kekerasan, pembebasan tahanan, menarik pasukan militer dari semua kota, dan memfasilitasi akses bagi semua media untuk meliput keadaan di negara tersebut (Republika, Liga Arab Terima Laporan Misi Pengamat Suriah, 2012).

Secara mendadak Arab Saudi menarik perwakilan tim pengamat negaranya dari Suriah pada 23 Januari 2012. "Negara saya akan menarik tim pengamat kami karena pemerintah Suriah tidak bisa menjalankan semua elemen dari rencana resolusi Liga Arab," kata Pangeran Saud al Faisal selaku Menteri Luar Negeri Arab Saudi pada pertemuan tertutup di Kairo, Mesir (Liputan6, 2012). Arab Saudi menilai kekerasan di Suriah bertambah parah dan meminta adanya dukungan yang lebih teknis dari masyarakat internasional.

Tindakan Arab Saudi mengejutkan banyak pihak, pasalnya, dengan ditariknya keputusan tersebut menandakan bahwa ambisi Arab Saudi semakin kuat untuk membawa kasus Suriah ke forum internasional. Pasalnya, penarikan tim pengamat tersebut akan memicu PBB mengambil langkah karena forum regional seperti Liga Arab dianggap tidak cukup menyelesaikan konflik tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Liga Arab mengambil keputusan untuk menghentikan semua kegiatan kelompok rombongan tim pengamatnya, namun penghentian ini hanya bersifat sementara yaitu hingga tanggal 28 Januari 2012 demi alasan keselamatan dan evaluasi kerja (Kartaatmaja, 2014) . Namun, Arab Saudi sebagai negara yang telah mengirimkan rombongan tim pengamat, bersikukuh mendesak untuk segera menghentikan misi pengamat karena akan mengancam lebih banyak nyawa, dan menyerahkan penyelesaian konflik ini seluruhnya ke PBB. Namun Pemimpin Liga Arab Nabil el-Arabi menolak seruan Arab Saudi dan mengatakan misi akan tetap dilanjutkan sejalan dengan protokol yang telah ditandatangani. "Kami memiliki misi khusus untuk waktu yang bisa diperpanjang di mana banyak hal bisa dicapai, tetapi sekarang kita perlu mengevaluasi situasi," katanya. Menanggapi hal tersebut, duta besar Arab Saudi untuk Inggris, Pangeran Mohammad Bin Nawaf menyetujui keputusan tersebut, namun harus tetap membawa kasus ini ke PBB untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. "Kami menarik keluar (monitor) karena kami tidak melihat adanya respon positif dari pemerintah Suriah. Tapi itu adalah sebuah proses. Kasus ini akan dibawa ke Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan dukungan atas inisiatif tersebut," kepada wartawan di London yang dimuat dalam situs berita *Reuters* (Reuters, 2012).

Seminggu sebelum diadakan KTT ke-24 di Doha, Qatar pada 21-27 Maret 2013, menteri luar negeri Arab Saudi Saud al Faisal mengajukan rekomendasi kepada Qatar untuk mengundang kelompok oposisi Suriah. Pemerintah Qatar sendiri menganggap SNC sudah mendapatkan pengakuan yang kuat di Suriah dan dunia internasional (Al-Arabiya, 2013). Selain itu SNC juga dianggap berperan penting dalam revolusi yang terjadi di Suriah yang tidak kunjung selesai akibat belum adanya tindak lanjut pemerintah Suriah menanggapi tuntutan kelompok oposisi yang menginginkan pergantian kekuasaan.

Hasil lain dari KTT Liga Arab di Doha tahun 2013 adalah memberikan hak bagi setiap anggota untuk memberikan bantuan militer maupun bantuan kemanusiaan kepada kelompok oposisi Suriah. Dalam sebuah draf dokumen yang disepakati pada pertemuan tersebut adalah solusi politik sebagai prioritas dalam mengakhiri konflik di Suriah. Namun, lebih lanjut di dalam dokumen tersebut menegaskan bahwa "Setiap negara memiliki hak sesuai dengan keinginannya untuk memberikan semua jenis tindakan untuk membela diri, termasuk bantuan militer untuk mendukung kelompok oposisi Suriah" (Reuters, 2013). Sebelum ditetapkan secara resmi tentang hak setiap negara untuk memberikan bantuan militer kepada oposisi Suriah, pada kenyataannya diketahui sudah ada beberapa negara yang melakukan tindakan tersebut. Arab Saudi dan Qatar tercatat telah mendanai dan mengirimkan bantuan militer untuk pembentukan dan memperkuat kelompok oposisi militer Suriah pada tahun 2012 dan 2013 yang diselundupkan melalui perbatasan-perbatasan Suriah.

KTT Liga Arab kembali diadakan di Kuwait pada tahun 2014, pertemuan ke-25 ini memprioritaskan konflik Suriah dalam agendanya. Seperti yang dimuat

dalam situs *Syrian Observation fo Human Rights*, Raja Salman Bin Abdulaziz meminta agar kelompok *Syrian Nation Council* dibersihkan kursi tetap untuk menggantikan peran pemerintah Suriah. "Untuk keluar dari krisis, Suriah membutuhkan perubahan keseimbangan kekuatan di lapangan," Pangeran Salman mengatakan pada sesi pembukaan pertemuan puncak Arab tahunan di Kuwait. Pada kesempatan ini, Arab Saudi menekankan perlunya dukungan lebih besar bagi pemberontak yang berjuang untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad (SOHR, 2014).

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organization*, organisasi merupakan suatu instrument yang dignakan oleh negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasar tujuan politik luar negerinya (Ardhiyanto, 2014). Seperti yang diketahui, Arab Saudi sangat mendukung upaya-upaya yang ditujukan untuk menggulingkan Bashar Al-Assad. Dominasi Arab Saudi dalam Liga Arab tidak terlepas dari ekonomi dalam negeri yang kuat. Melihat kenyataan bahwa keputusan Liga Arab didominasi oleh Arab Saudi, Liga Arab dapat dikatakan menjadi instrument yang digunakan Arab Saudi untuk mencapai kepentingan. Selain itu telah dijelaskan bahwa sejak awal kemunculannya pada tahun 2012, kelompok oposisi telah menerima bantuan dari Arab Saudi. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Liga Arab untuk mendukung kelompok oposisi dengan memberikan hak kepada anggota untuk memberikan bantuan persenjataan adalah upaya Arab Saudi untuk melegitimasi dukungan negara tersebut kepada kelompok oposisi melalui Liga Arab. Kebijakan tersebut juga bisa disebut upaya bagi kelompok oposisi Suriah untuk mengumpulkan dukungan internasional secara lebih luas.

2. PBB

Upaya global Arab Saudi melalui Liga Arab tidak hanya dalam lingkup regional saja, namun juga dalam forum internasional seperti PBB. Setelah penarikan sementara tim pengamat Liga Arab pada Januari 2012, Suriah mengetahui hal ini akan menyebabkan datangnya intervensi yang datang dari pihak asing. Pasalnya, Suriah menyetujui adanya tim pengamat Liga Arab untuk menghindari adanya intervensi dari PBB dan pihak-pihak barat khususnya Amerika Serikat. Penarikan sementara tim pengamat tersebut menimbulkan dampak negatif pada penilaian dan pertimbangan dewan keamanan PBB.

Pada bulan Maret 2012, sebagai tindak lanjut dari permohonan Liga Arab terkait bantuan PBB terhadap konflik Suriah, PBB menunjuk Kofi Annan sebagai wakil organisasi menjadi mediator antara pemerintah, kelompok oposisi dan negara-negara yang terlibat. Rencana perdamaian tersebut antara lain mencakup diakhirinya pertempuran di bawah pengawasan PBB, penarikan pasukan pemerintah dari berbagai kota, dan mempermudah akses untuk pemberian bantuan kemanusiaan. Akhirnya pada bulan April 2012, pengiriman pertama 300 orang tim pemantau untuk mengawasi gencata senjata tersebut. (Mahasin, 2017, p. 12) Kofi Annan hingga akhir jabatannya belum dapat menyelesaikan konflik internal Suriah dan akhirnya mundur pada tanggal 19 Agustus 2012.

Dalam proses pengunduran dirinya, Kofi Annan mengusulkan kepada Presiden Bashar Al-Assad untuk mengundurkan diri demi kebaikan negerinya. Kepada masyarakat internasional Kofi Annan menghimbau Rusia, China dan Iran untuk membujuk Bashar Al-Assad untuk merubah gaya pemerintahan yang represif diganti dengan pemerintahan transisi, usulan ini mengingatkan bahwa pemerintah telah kehilangan

legitimasi. Sementara kepada Amerika Serikat dan Arab Saudi Kofi Annan meminta agar mau membujuk oposisi agar mengikuti prosesproses politik yang menyertakan semua personil dan institusi yang berasosiasi atau berhubungan dengan pemerintah (Setiawati, 2012)

Posisi Kofi Anan digantikan oleh Diplomat Senior asal Aljazair, Lakhdar Brahimi pada tanggal 31 Agustus 2013. Menurut Bahrimi, ia akan berusaha mendengar upaya dan usulan kedua pihak antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi, sehingga upaya penyelesaiannya bukan rancangan dari Liga Arab maupun PBB. Namun upaya Bahrini sama dengan pendahulunya yang mengalami kesulitan dalam upaya penyelesaian dan mediasi antara pemerintah dan kelompok oposisi dalam konflik Suriah. Peperangan tetap terjadi hingga pada saat keputusan dirinya untuk mundur dari kasus ini pada tanggal 14 Mei 2014, setelah usaha-usaha internasional untuk menemukan solusi politik bagi perang saudara tiga tahun gagal. "Sangat menyedihkan bahwa saya meninggalkan posisi ini dan meninggalkan Suriah dalam kondisi yang buruk," kata Brahimi saat mengumumkan pengunduran dirinya (Republika, 2014). Upaya Brahimi dianggap gagal karena sebelumnya perundingan yang dia mediasi terhenti ditengah jalan karena tidak ada tanggapan positif antara kedua pihak baik pemerintah Bashar Al-Assad maupun kelompok oposisi.

Langkah Arab Saudi dalam upaya mengakhiri konflik di Suriah kembali ditunjukkan pada saat pertemuan yang daiadakan Liga Arab pada 1 September 2013 di Kairo Mesir, Liga Arab menawarkan resolusi agar masyarakat internasional mengambil tindak ke Suriah. Hal ini sebagai tanggapan atas penggunaan senjata kimia yang

dilakukan presiden Bashar Al-Assad terhadap masyarakatnya pada tragedi *Ghouta Chemical Attack* pada 21 Agustus 2013 di Suriah. Liga Arab sepakat membawa rancangan resolusi ini ke forum internasional PBB. Liga Arab mendesak PBB dan masyarakat internasional mengambil langkah pencegahan dan tindakan yang perlu terhadap rezim Bashar Al-Assad. "Waktunya telah tiba untuk menyerukan kepada masyarakat dunia untuk menanggung tanggung jawabnya dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan tragedi ini," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Saud al-Faisal pada acara pertemuan tersebut (Kompas, 2013). Resolusi ini juga berisi janji negara-negara Liga Arab untuk menyajikan segala bentuk dukungan bagi rakyat Suriah dalam upaya membela diri. Namun dalam pertemuan ini Arab Saudi kembali memiliki perbedaan pendapat, kali ini dengan negara Mesir, Lebanon dan Irak terkait keikutsertaannya dalam rencana intervensi terhadap negara Suriah.

Menanggapi hal ini, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris, China, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat tidak langsung menyetujui proposal intervensi militer yang diajukan Arab Saudi bersama Liga Arab, namun PBB mengeluarkan resolusi melucuti senjata kimia yang dimiliki Suriah. Keputusan ini menjadi salah satu langkah yang maju dalam upaya mengakhiri penggunaan senjata kimia di Suriah (DeYoung, 2014).

Pasalnya, PBB memiliki aturan khusus yang menyebabkan resolusi di Suriah memiliki banyak hambatan. Salah satunya, syarat diberlakukannya resolusi dari Dewan Keamanan PBB adalah dengan memperoleh kesepakatan dari Sembilan anggota tidak tetap dan harus disepakati oleh semua anggota tetap. Hal ini tertera dalam Piagam PBB Pasal 27 ayat 2 dan

3 (Hanafiyah, 2012). Dalam kasus yang terjadi di Suriah, Rusia dan China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan sudah sering kali mengeluarkan hak vetonya dalam setiap rencana resolusi yang dirancang oleh PBB.

Setelah bertahun-tahun Suriah tidak kunjung mengalami perubahan yang signifikan meskipun telah beberapa kali dilakukan perundingan. Kekerasan yang terjadi antara pemerintah dan kelompok oposisi. Pada tanggal 19 Desember 2015, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat kembali mengeluarkan resolusi dengan nomor 2254. Resolusi ini berisi tentang gencatan senjata dan pengadaan Pemilu di Suriah. Pemerintah transisi Suriah nantinya harus menyiapkan pemilu yang bebas dan adil di bawah pengawasan PBB. Diharapkan melalui pemilu akan terpilih pemimpin Suriah yang baru. Resolusi ini merupakan inisiatif dari dua negara yang bersebrangan ideology antara Amerika Serikat dan Rusia dalam upaya penyelesaian konflik.

Sesuai prediksi dunia, Partai Ba'ath yang mendukung Bashar Al-Assad kembali memenangkan suara pemilu yang diadakan pada 13 April 2016. Menurut kepala komisi pemilu Suriah, Hisham al-Shaar, Partai Ba'ath bersama sekutunya berhasil memenangkan 200 dari 250 kursi parlemen (SindoNews, 2016). Hal ini menjadi bukti kekuatan politik rezim Bashar Al-Assad yang kuat, membuat kelompok oposisi kecewa termasuk negara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Pemilu yang dilakukan di Suriah bisa dianggap "palsu" karena dibawah tekanan PBB. Selain itu, pemerintah Suriah tidak memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan Pemilu tersebut karena dilakukan ditengah perang saudara.

Meskipun gencatan senjata sedang berlaku di negara tersebut, pada 18 September 2016, Arab Saudi bersama sekutunya Amerika Serikat secara tidak langsung melanggar perjanjian tersebut dengan melancarkan serangan di wilayah Timur Suriah dan menewaskan sekitar 62 pasukan Suriah yang melawan ISIS (BBC, 2016). Tindakan ini membuat Rusia geram, karena sebelumnya Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa serangan udara AS dan Arab Saudi akan berubah menjadi masalah karena Washington menolak mengkoordinasikan masalah dengan Moskow. Pada tanggal 21 September 2016 Rusia dituduh telah melakukan serangan udara yang dijatuhkan terhadap Aleppo Timur, dimana saat itu truk konvoi bantuan kemanusiaan sedang menjalankan misi. Sekitar 20 warga sipil tewas, termasuk pejabat senior Bulan Sabit Merah, serta 18 dari 31 truk bantuan hancur. Pada hari itu juga, perjanjian gencatan senjata di Suriah berakhir (VIVA, 2016).

Dewan Keamanan PBB telah dianggap gagal mengambil langkah-langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional di Suriah. Dikeluarkannya beberapa resolusi juga masih belum bisa memberikan solusi politik bagi Suriah dan selalu menemui kendala karena adanya veto dari Rusia dan China yang merupakan sekutu pemerintah Suriah Bashar Al-Assad. Di pihak lain ada Amerika Serikat dan Arab Saudi yang selalu menyerukan perlawanan terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad. Amerika Serikat sebagai pemegang kekuatan di forum internasional PBB selalu mendukung keputusan Liga Arab dan Arab Saudi di kawasan Timur Tengah, termasuk bantuan terhadap kelompok oposisi dan resolusi perdamaian dengan adanya intervensi militer terhadap Suriah.

D. Dinamika Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat

Setelah munculnya fenomena Arab Spring, salah satu yang menjadi sorotan dunia adalah hubungan aliansi antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Meski memiliki latar belakang negara yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan dekat yang terjalin sejak lama. Eksistensi Arab Saudi tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan hubungan erat dengan Amerika Serikat. Arab Saudi sendiri merupakan mitra paling dekat Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Politik luar negeri Arab Saudi terhadap Amerika Serikat sendiri didasari oleh tiga prinsip. Pertama, kesamaan kedua negara tentang anti komunis dan anti terorisme. Kedua terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Ketiga, keinginan mengalirnya minyak dari kawasan ke negara-negara industry. Ketiga alasan tersebut merupakan landasan antara negara Islam yang menganut sistem monarki absolut dengan negara demokrasi sekuler itu tetap menjalin hubungan.

Hubungan kedua negara dimulai sejak tahun 1930 ketika pemerintah Amerika Serikat mengakui kedaulatan Arab Saudi. Kedua negara dianggap memiliki kepentingan nasional yang saling menguntungkan. Amerika membutuhkan pasokan minyak Arab Saudi untuk pertumbuhan industrinya sedangkan Arab Saudi membutuhkan Amerika Serikat dalam eksplorasi dan mengolah kekayaan alam bawah tanah Arab Saudi yang pada saat itu perkembangan ekonominya sedang mengalami krisis akibat depresi dunia. Pada tahun 1933, kedua negara sepakat membentuk kerjasama dengan hadirnya perusahaan minyak *Arab American Company* (Aramco) yang merupakan konsorsium perusahaan minyak raksasa Amerika Serikat yaitu Esso, Texaco, Mobil dan Socal (Mulligan, 2015). Hubungan kedua negara terus meningkat, terutama pasca Perang Dunia ke-II. Meskipun mengaku berada pada posisi netral, pada kenyataannya Arab Saudi mengizinkan pendirian pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Arab Saudi, meskipun

perndingan ini di rahasiakan demi menjaga status netralitas Arab Saudi di mata dunia internasional.

Di dalam kawasan Timur Tengah, terdapat dua aliansi yang dimiliki Amerika Serikat, yaitu Arab Saudi dan Israel. Kedua negara menjadi represantif Amerika Serikat dalam menyebarkan pengaruhnya di kawasan. Arab Saudi telah berkomitmen untuk memberikan dukungan rahasia dari kepentingan nasional Amerika Serikat sejak masa pemerintahan presiden Ronald Reagan. Dukungan Ara Saudi tidak terlepas dari salah satu Doktrin yang diperkenalkan oleh pemerintahan Raegan yaitu Anti-Komunis (Karbesi, 2016) Pada prinsipnya, doktrin Reagan merupakan kebijakan administrasi Reagan yang menekankan pada semangat kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*), dan nilai-nilai demokratis (*democratic values*). Namun, Arab Saudi mengartikan kebijakan tersebut menggunakan sudut pandangnya sebagai negara Islam yang anti terhadap paham ketidak-percayaan terhadap agama.

Ketika terjadinya invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan pada tahun 1979-1989, Dhahran yang merupakan salah Satu kota Arab Saudi menjadi tempat transit persenjataan yang dikirim Amerika Serikat terhadap para pejuang Afghanistan. Arab Saudi juga memberikan akses untuk terbang daiats wilayahnya kepada Amerika Serikat untuk melancarkan upaya menyingkirkan Uni Soviet (Ramadhani, 2015) Keputusan kerjasama tersebut tidak terlepas karena latar belakang hubungan kedua negara yang ingin mencegah paham komunis yang dibawa Uni Soviet masuk ke kawasan.

Pada 23 Januari 1980 Presiden Jimmy Carter dalam pidato *State of the Union* mengeluarkan kebijakan yang disebut *Carter Doctrine*. Inti doktrin ini adalah Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di kawasan Timur Tengah bila diperlukan. Isi dari doktrin ini adalah (Adam, 2013) :

- Mengusahakan agar sumber-sumber alam Timur Tengah tidak jatuh ketangan musuh
- Menjamin tersaluranya sumber-sumber alam penting bagi industri dan militer Amerika Serikat bersama sekutunya
- Menjaga mengalirnya keuntungan investasi dan usaha-usaha as
- Menjaga kredibilitas dengan memenuhi komitmen Amerika Serikat di Timur Tengah
- Meneruskan hak transit dan over flight bagi pesawat dan kapal laut
- Menjaga eksistensi penguasa-penguasa Timur Tengah yang menjadi sekutu Amerika Serikat
- Mempertahankan diri dari ancaman-ancaman kelompok yang membahayakan dominasi Amerika Serikat dan persekutuan barat di Timur Tengah.

Hubungan erat kedua negara ini mengalami krisis pada saat peristiwa 11 September 2001 atau yang dikenal dengan *Black Tuesday* yang mengejutkan dunia internasional, yaitu runtuhnya gedung kembar *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat, dimana kelompok teroris berhasil membajak pesawat komersil Amerika Serikat dan menyerang gedung tersebut. Berdasarkan informasi dan data intelijen, pemerintah AS pada saat itu yang dibawah pemerintahan Goerge Bush, menetapkan bahwa Osama bin Laden beserta kelompok al-Qaeda adalah pelaku dari penyerangan terhadap AS. Pada 7 Oktober 2001, Amerika menyatakan sikap perang terhadap teror, mereka men-cap "terorisme" sebagai musuh yang universal terhadap semua bangsa. Kebijakan yang diambil pemerintah AS berdampak langsung secara global. Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah AS pada saat itu dalam menghadapi terorisme adalah kebijakan *War on Terorrism*. Renggangnya hubungan kedua negara terjadi karena temuan penyelidikan bahwa 15 dari 19 tersangka pelaku terror dalam kejadian ini merupakan warga Arab Saudi

yang memiliki notaben sebagai negara Islam terbesar. Hampir seluruh media massa menjadikan pemberitaan tersebut sebagai berita utama, sehingga menimbulkan suatu ketakutan terhadap segala yang berbau Islam (*Islam Phobia*) (Nugraha, 2012). Timbulnya ketakutan masyarakat internasional ini merugikan kepentingan nasional negara-negara Islam, termasuk Arab Saudi.

Meskipun demikian, Arab Saudi tidak pernah dinyatakan secara formal terlibat dalam serangan tersebut. Pemerintah Arab Saudi membantah tuduhan itu dan menekan Amerika Serikat untuk mengklarifikasi tuduhan yang diberikan kepada negara tersebut terlebih saat RUU JASTA (*Justice Against Sponsors of Terrorism Act*) di setujui oleh pihak Senat dan Kongres Amerika Serikat. Arab Saudi mengancam akan memutuskan dan merusak hubungan kerjasama Arab Saudi – Amerika Serikat yang sudah terjalin sejak lama.

Pada tahun 2016, Presiden Barrack Obama sebagai presiden mem-veto undang-undang yang memungkinkan para keluarga korban serangan 9/11 untuk menggugat Arab Saudi. "Menghapuskan imunitas pemerintah asing di pengadilan Amerika Serikat yang tidak dianggap mendukung terorisme dan hanya berdasarkan dugaan semata bahwa negara itu terkait terorisme telah mengancam prinsip-prinsip yang sejak lama melindungi Amerika Serikat, tentara, dan personil kita," kata Obama dalam pernyataannya. (CNN, 2016) Meskipun demikian, nyatanya Kongres Amerika Serikat menolak veto tersebut. Penolakan dengan angka mutlak ini merupakan kali pertama dalam sejarah kepemimpinan Obama selama delapan tahun terakhir. Pemungutan suara dilakukan pada 29 September 2016 dan berakhir dengan 348 menolak dan 77 mendukung. (Kompas, 2016)

Renggangnya hubungan kedua negara akan mempersulit upaya kedua negara dalam melaksanakan kepentingan nasionalnya. Amerika Serikat memiliki kepentingan menggunakan Arab Saudi untuk mengontrol politik dan

pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, Arab Saudi membutuhkan kekuatan militer dan perlindungan dari Amerika Serikat dalam melawan perkembangan Iran khususnya di Suriah.

E. Hubungan Kerjasama Arab Saudi dan Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Suriah

Dalam kasus konflik yang terjadi di Suriah kedua negara sempat kembali mengalami ketegangan akibat presiden Obama menolak adanya intervensi terhadap Suriah pasca penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad pada tahun 2013. (BBC, 2015) Meskipun ketika Amerika Serikat melakukan perundingan dengan Iran terkait pencabutan nuklir. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi Arab Saudi, pasalnya Iran dianggap akan lebih leluasa berperan di kawasan Timur Tengah.

Duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat, Pangeran Bandar bin Sultan mengatakan kepada para diplomat Eropa bahwa Amerika Serikat telah gagal bertindak secara efektif terhadap presiden Suriah Bashar al-Assad. Kritik Arab Saudi itu muncul beberapa hari setelah peringatan 40 tahun peristiwa embargo minyak Oktober 1973 yang diberlakukan negara-negara Timur Tengah untuk menghukum Barat yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur.

Pada tanggal 18 Oktober 2013 Arab Saudi telah memberi sinyal ketidaksetujuan mereka atas kebijakan luar negeri Obama ketika mereka menolak menjadi Dewan Keamanan PBB, sebagai cerminan kemarahan kerajaan itu atas kegagalan komunitas internasional untuk mengakhiri perang saudara di Suriah dan bertindak dalam sejumlah masalah di Timur Tengah (VOA, 2013). Menanggapi situasi terakhir, anggota parlemen Amerika dari partai Demokrat Chris Van Hollen mengatakan bahwa “Kami tahu permainan mereka. Mereka sedang mencoba mengirimkan pesan bahwa kami harus melibatkan militer secara total di Suriah, dan saya pikir akan menjadi sebuah kesalahan besar untuk berada di

tengah-tengah perang saudara di Suriah," (Welle, 2013). Amerika Serikat tidak bisa dipungkiri memiliki kepentingan atas hubungannya dengan Arab Saudi untuk melancarkan kebijakannya di kawasan, di sisi lain, kecaman Arab Saudi tersebut memang bisa dikatakan ajakan tegas pemerintah Arab Saudi atas kekhawatiran kekuatan dukungan Iran terhadap pemerintah Bashar Al-Assad.

Pada tanggal 28 Januari 2015, Raja Salman bin Abdul Aziz menerima kunjungan Barrack Obama beserta delegasinya. Barrack Obama. Kunjungan di tengah situasi konflik Suriah menandakan kembalinya hubungan baik antara kedua negara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Kembalinya hubungan ini tidak terlepas dari fakta bahwa Arab Saudi yang merupakan aliansi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah memainkan peranan penting dalam isu regional yang terjadi. Amerika Serikat kerap menggunakan peran Arab Saudi tiap kali mengalami krisis eksistensi di kawasan Timur Tengah. Seperti ketika terjadi invasi Irak ke Kuwait, Perang Teluk, termasuk krisis yang saat ini terjadi di Suriah. (Karbesi, 2016) Dalam fase ini, Arab Saudi setuju untuk bersama melakukan perang melawan tindakan terorisme terutama dalam kawasan Timur Tengah yang di cap sebagai sarang para teroris.

Sebagai mitra Amerika Serikat, Arab Saudi berkewajiban untuk mendukung segala kepentingan Amerika Serikat dalam kawasan. Dalam kasus Suriah, salah satu kepentingan Amerika Serikat adalah melindungi Arab Saudi sebagai mitra Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Pada tahun 2016, Arab Saudi dan Amerika Serikat bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk menjalin koalisi untuk mengatasi konflik di Suriah. "Kerajaan Saudi mengumumkan kesiapannya berpartisipasi mengirim pasukan darat bersama militer Amerika Serikat, dengan pertimbangan kami memiliki pengalaman di Yaman. Kami menyadari, perlunya dukungan tim penggempur darat," kata Brigadir Jendral Ahmad Asiri, seorang pejabat tinggi kementerian

pertahanan Arab Saudi. (SindoNews, 2016) Pada dasarnya koalisi ini dibangun untuk memerangi kelompok teroris ISIS, namun ada banyak isu dan kepentingan yang dibahas dibalik serangan terhadap negara Suriah.

Pada tanggal 7 April 2016 dini hari, Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap Suriah berupa 59 rudal Tomahawk yang ditembakkan dari dua kapal perang USS Porter dan USS Ross yang bersiaga di laut Mediterania. Rudal tersebut dijatuhkan ke pusat pangkalan udara Shayrat di wilayah Homs, Suriah. Serangan ini sebagai respon setelah citra hasil satelit pelacakan radar departemen pertahanan Amerika Serikat menunjukkan pesawat tempur dari pangkalan udara Syahrat dan menjatuhkan senjata kimia di Khan Sheikhun, Provinsi Idlib, Suriah. Serangan tersebut menewaskan 80 orang termasuk anak-anak. (Hutapea, 2017) Menanggapi hal ini, Arab Saudi mendukung penuh keputusan Amerika Serikat melakukan serangan udara ke Suriah. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa Amerika Serikat telah berani mengambil langkah disaat masyarakat internasional gagal untuk meredam tindakan keji pemerintah Suriah. (Kompas, 2017)

Keikutsertaan pemerintah Amerika Serikat sendiri bukan untuk menguasai perekonomian Suriah, karena Suriah bukan merupakan negara dengan cadangan dan produksi minyak yang besar. Dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, Suriah merupakan negara eksportir minyak yang kecil bagi negara Amerika Serikat.

Tabel 3.1 Negara Importir Minyak Mentah Amerika Serikat di Timur Tengah 2011-2016 (per-ribu barrel)

Negara	2011	2016
Arab Saudi	1.186	1,099
Uni Emirat Arab	7	11
Irak	459	419
Kuwait	191	209
Suriah	3	-

Sumber : U.S Energy Information

Administration https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move impcus a2 nus ep c0 im0 mbblpd a.htm diunduh pada 26 Oktober 2017

Berdasarkan tabel diatas, jumlah ekspor minyak mentah Suriah terhadap Amerika Serikat tidak lebih dari 3.000 barrel per hari, jumlah tersebut tidak sebanding dengan negara-negara produsen lainnya di kawasan Timur Tengah, terlebih Amerika Serikat telah berhenti mengimpor minyak dari Suriah sejak tahun 2011.

Letak geografis Suriah yang berdekatan dengan negara-negara produsen minyak menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di dalam kawasan Timur Tengah. Menurut Julian Jessop, Suriah bukan merupakan negara dengan produksi minyak yang besar, bukan juga tempat strategis untuk transit ekspor gas dan minyak. Namun dengan kondisi Suriah yang tidak stabil akan menjadi ancaman terhadap daerah sekitarnya. Yang ditakutkan adalah eskalasi konflik yang merembet ke negara-negara tetangganya, terlebih jika melihat dukungan Iran terhadap rezim yang berkuasa (Fabiansyah, 2015).

Dengan memenangkan konflik Suriah, Amerika Serikat memiliki kepentingan mengamankan stabilitas ekonomi dengan negara-negara produsen yang berkaitan dengan impor minyak mentah. Amerika Serikat juga berkewajiban melindungi dan membantu Arab Saudi sebagai mitra Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kepentingan nasional Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Suriah,

tidak terlepas dari fakta bahwa Amerika Serikat membawa pengaruh demokrasi untuk hadir di kawasan Timur Tengah, dalam kasus ini Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap kelompok oposisi Suriah yang menginginkan kebebasan dan keadilan dalam sistem pemerintahannya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang telah Amerika Serikat perkenalkan.

Sebagai mitra Amerika Serikat di kawasan, Arab Saudi juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan Amerika Serikat. Namun, di sisi lain, dukungan Amerika Serikat juga di sama artikan dengan bentuk perlindungan negara adidaya tersebut terhadap pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi yang menginginkan bantuan dan perlindungan untuk melawan perkembangan Iran di kawasan yang semakin mengancam eksistensi Arab Saudi.

Konflik Suriah yang telah terjadi sejak tahun 2011 menjadi momentum yang tepat bagi Arab Saudi dan Amerika Serikat untuk bekerjasama melengserkan pemerintahan Bashar Al-Assad dalam rangka menjaga stabilitas serta kepentingan nasional masing-masing negara yaitu dengan cara memberikan dukungan penuh terhadap kelompok oposisi untuk segera menjatuhkan legitimasi politik Bashar Al-Assad.